

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024)**

**THE INFLUENCE OF THE GOVERNMENT'S INTERNAL CONTROL
SYSTEM, THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND THE
APPLICATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS ON
THE QUALITY OF REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORTS
(Case Study in South Tangerang City Government 2024)**

Ida Martyana¹, Elly Suryani²

¹Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia

idamartyanarbs@student.telkomuniversity.ac.id,

²Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, ellysuryani@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran berjalan dan laporan keuangan yang berkualitas akan menunjukkan pemerintah telah merealisasikan anggaran sesuai dengan wewenang yang di berikan. Pada tahun 2022 LKPD Kota Tangerang Selatan memperoleh opini audit WTP namun BPK masih menemukan tiga catatan permasalahan dalam LKPD tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tangerang Selatan. Teknik sampling yang digunakan adalah metode sampling jenuh. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 70 responden. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda menggunakan program aplikasi IBM SPSS Versi 30.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Secara parsial sistem pengendalian internal pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Teknologi Informasi, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

I. PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat, setelah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), LKPD akan diserahkan kepada DPRD untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tangerang Selatan tercatat berhasil mendapat opini

audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada LKPD yang telah disusun sebanyak dua belas kali beturut-turut, namun begitu BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam pelaporannya (TitikKata.com, 2024). Berdasarkan hasil *Quality Assurance* BPKP Pusat atas Penilaian Maturitas (tingkat kematangan) SPIP, Pemkot Tangerang Selatan ada pada tingkat 3 atau level “terdefinisi”, dengan beberapa catatan yang harus diperhatikan yaitu kebijakan benturan kepentingan serta penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah masih bersifat normatif belum memperhatikan fungsi pengawasan itu sendiri (Peraturan Walikota Kota Tangerang Selatan No 63, 2022). Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), guna tercapainya laporan keuangan yang berkualitas terdapat ukuran-ukuran normatif yang harus di wujudkan dalam informasi akuntansi yaitu dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*). Pemerintah pusat berkepentingan untuk menerima laporan keuangan yang berkualitas dari pemerintah daerah sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah terhadap kewenangan yang telah diberikan dalam mengambil Keputusan, maka dari itu pemerintah daerah memiliki kewajiban menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas jika memberikan informasi laporan keuangan yang mudah untuk dipahami, serta dapat memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan (Ikyarti & Nila Aprilia, 2019).

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Admaja & Wahyundaru (2020) faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Informasi Teknologi, Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

II. TINJAUAN LITERATUR

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

LKPD ialah laporan yang disusun guna menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (PP Nomor 71 Tahun 2010).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hasil dari proses pencatatan akuntansi yang dapat memberikan informasi keuangan yang mudah dipahami pengguna laporan keuangan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan laporan keuangan yang dapat memberikan informasi akurat terkait posisi dan kinerja keuangan pemerintah daerah (Ridzal et al., 2022).

H1: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknolgi Informasi, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.1.2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah sistem yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai guna memberikan keyakinan terkait tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, terkait keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan PP Nomor 60 Tahun 2008.

Pengendalian Internal Pemerintah akan tercapai jika memenuhi indikator berikut, yaitu: (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Risiko, (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi, dan (5) Pemantauan.

Sistem pengendalian internal yang kuat memungkinkan proses pelaporan yang lebih transparan, akurat, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan sistem pengendalian internal pemerintah, sangat diperlukan, karena semakin baik sistem pengendalian internal pemerintah, maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Hendarin & Rahayu, (2022) dan Rahayu & Kanita, (2023)

yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H2: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan.

2.1.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan teknologi baik dalam mencatat mengolah data, berkomunikasi dan bertukar informasi secara terhubung. Teknologi informasi memberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari baik dalam pekerjaan dan hal lain. Menurut Admaja & Wahyundaru (2020) pemanfaatan teknologi bermanfaat guna menyederhanakan pengelolaan keuangan agar instansi menjadi lebih efektif serta efisien dalam menyajikan informasi keuangan daerah kepada masyarakat. Menurut Koto (2019) dalam Rahayu & Dewi Kanita (2023) pemanfaatan teknologi informasi dapat diukur menggunakan 8 (delapan) indikator yaitu: (1) Komputer yang Memadai; (2) Jaringan Internet yang Terpasang dan Terhubung; (3) Pemanfaatan Jaringan Internet; (4) Proses Akuntansi Secara Komputerisasi; (5) Pengelolaan Menggunakan Software; (6) Sistem Informasi yang Terintegrasi; (7) Tersedianya Jadwal Pemeliharaan; dan (8) Peralatan yang Telah Usang/Rusak Didata dan Diperbaiki.

Pemanfaatan Teknologi Informasi penting dalam proses pencatatan akuntansi terutama dalam penyusunan laporan keuangan. Pelaporan keuangan yang optimal dan andal dapat didukung dengan pemanfaatan TI, karena pemanfaatan TI yang baik akan memberikan kemudahan dalam penyusunan, memproses, dan menyimpan laporan guna mendapatkan hasil laporan yang berkualitas (Fazlurahman Faesal et al., 2020). Hal ini didukung oleh hasil penelitian Ridzal et al., (2022) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

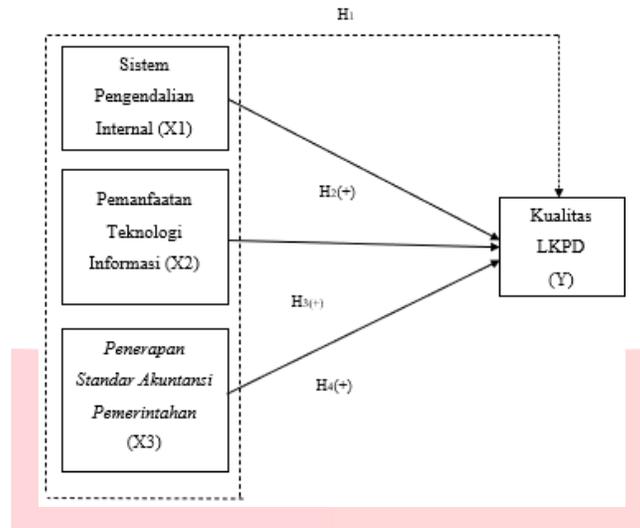
H3: Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan

2.1.4 Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan

Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) meliputi prosedur pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, pelaporan posisi keuangan serta operasi keuangan dalam rangka pertanggungjawaban Keuangan Daerah kepada pemerintah pusat dan masyarakat. SAP bertujuan untuk memberikan acuan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah guna terciptanya keselarasan laporan keuangan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Dalam pelaksanaannya, Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki beberapa indikator yang harus dipenuhi agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, adapun indikator-indikator tersebut yang dimuat dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 yaitu: PSAP No.1 Penyajian laporan keuangan, PSAP No.2 Laporan realisasi anggaran, PSAP No.3 Laporan arus kas, PSAP No.4 Catatan atas laporan keuangan, PSAP No.5 Akuntansi persediaan, PSAP No.6 Akuntansi investasi, PSAP No.7 Aset tetap, PSAP No.8 Akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, PSAP No.9 Akuntansi kewajiban, PSAP No.10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan, PSAP No.11 Laporan konsolidasi, PSAP No.12 Laporan operasional.

SAP merupakan prinsip dan pedoman dalam penyusunan atau penyajian LKPD, menjadikan SAP sebagai pedoman dalam penyusunan akan memudahkan aparatur bagian keuangan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Lantu et al., (2023) yang menyatakan bahwa secara parsial penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H4: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
 Sumber: Data olah peneliti (2024)

Keterangan:

- - - - - : Simultan
- _____ : Parsial

III. METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tangerang Selatan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *non probability sampling* dengan sampel jenuh dimana seluruh populasi yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner akan dijadikan sampel dalam penelitian. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah Kepala SKPD, Kasubbag, dan Bendahara dari 37 SKPD pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan target responden sejumlah 111. Berdasarkan kuesioner yang telah disebarakan pada 37 SKPD diperoleh hasil dengan jumlah responden sebanyak 70 orang yang merupakan pegawai di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Tangerang Selatan jumlah tersebut terdiri dari 36 SKPD yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner dan 1 SKPD tidak berpartisipasi dalam pengisian yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Berikut merupakan tabel hasil penyebaran kuesioner dalam penelitian ini.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari (1) Uji normalitas, (2) Uji multikolinieritas, dan (3) Uji heterokedastisitas. Kemudian dilakukan pengujian analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis yang terdiri dari (1) Koefisien determinasi, (2) Pengujian hipotesis secara simultan atau Uji F, dan (3) Pengujian hipotesis secara parsial Uji t menggunakan program aplikasi IBM SPSS Versi 30.0.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif dilakukan untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pernyataan-pernyataan yang terdapat pada kuesioner yang diberikan kepada responden. Deskriptif variabel pada penelitian ini terdapat empat variabel, yaitu: sistem pengendalian internal pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Tangerang Selatan. Berikut gambaran pada masing-masing variabel tersebut pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Nilai Indeks	Total	Presentase	Kategori
Sistem Pengendalian Pemerintah (X1)	5,250	4,459	84,93%	Sangat Baik
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	6,650	5,606	84,30%	Sangat Baik
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3)	9,100	7,806	85,78%	Sangat Baik
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	4,550	3,957	86,96%	Sangat Baik

Sumber: Data primer yang telah diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan pada tabel 4.1 hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa setiap butir pertanyaan dalam kuesioner pada variabel sistem pengendalian internal pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berada pada kategori sangat baik karena presentase yang ditunjukkan berada pada interval $> 84\% - 100\%$.

4.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah salah satu tahap penting dalam analisis regresi yang dilakukan untuk memastikan bahwa residual atau alat dari model regresi berdistribusi normal.

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		70	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	2,30308704	
Most Extreme Differences	Absolute	,077	
	Positive	,077	
	Negative	-,055	
Test Statistic		,077	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	,362	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,349
		Upper Bound	,374

Sumber: Data Primer yang telah diolah oleh peneliti (2024)

Berdasarkan tabel 4.2 hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* dapat diketahui bahwa nilai signifikansi *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 yang berarti nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual dalam penelitian ini berdistribusi normal.

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas merupakan salah satu tahap penting dalam analisis regresi yang bertujuan untuk memastikan tidak adanya hubungan linier yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. Berdasarkan hasil uji menggunakan SPSS diperoleh nilai tolerance dan VIF sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	,278	3,603
	X2	,312	3,204
	X3	,241	4,156

Sumber : Data primer yang telah diolah oleh peneliti (2024)

Berdasarkan tabel 4.3 hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF variabel X1 sebesar 3.603, variabel X2 sebesar 3.204, dan variabel X3 memiliki nilai VIF sebesar 4.156. Nilai VIF untuk semua variabel berada di bawah ambang batas kritis 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas yang signifikan di antara variabel independen yang berarti bahwa tidak terdapat keterkaitan antar variabel bebas.

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah pengujian dalam analisis regresi yang bertujuan untuk memastikan bahwa varians galat atau residual dari model regresi bersifat konstan di seluruh rentang nilai variabel independen.

Tabel 4.4 Hasil Uji Heterokedastisitas Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std.Error	Beta		
1	(Constant)	6,206	1,446		4,292	,000
	X1	-,012	,037	-,068	-,313	,755
	X2	-,059	,031	-,387	-1,884	,064
	X3	,010	,024	,100	,426	,672

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Data primer yang telah diolah oleh peneliti (2024)

Hasil uji menunjukkan bahwa semua nilai signifikansi variabel independen lebih besar dari 0.05, yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara variabel independen dan nilai absolut residual (ABS_RES). Dengan demikian, model regresi ini tidak memiliki indikasi heteroskedastisitas. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut tanpa risiko bias yang disebabkan oleh ketidakstabilan varians error.

4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengestimasi dan menjelaskan seberapa besar variabel-variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 4.4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,984	2,671		2,989	,004
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X1)	,515	,068	,682	7,577	,000
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	,217	,058	,320	3,770	,000
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3)	-,016	,044	-,034	-,356	,723

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber : Data primer yang telah diolah oleh peneliti (2024)

Berdasarkan tabel diatas, konstanta dan koefisien regresi untuk variabel sistem pengendalian internal pemerintah, pemanfaatan teknologi dan informasi, dan penerapan standar akuntansi pemerintahan membentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 7.984 + 0,515 (X1) + 0,217 (X2) - 0,16 (X3)$$

Berdasarkan persamaan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a = 7.984 artinya jika variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) dipengaruhi oleh ketiga variabel bebasnya yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3), maka variable Kualitas Laporan Keuangan (Y) akan meningkat
- b1 = 0,515 artinya Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (X1) meningkat, maka variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) akan meningkat.
- b2 = 0,217 artinya Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) meningkat, maka variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) akan meningkat.
- b3 = -0,16 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3) meningkat, maka variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) akan menurun.

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R-square atau R²) menunjukkan seberapa besar proporsi variasi pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model regresi.

Tabel 4.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,923 ^a	,851	,845	2,35485

Sumber : Data primer yang telah diolah oleh peneliti (2024)

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi Adjusted R Square sebesar 0,845 hal ini berarti bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (X1), Pemanfaatan Teknologi dan Informasi (X2), dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3) memiliki pengaruh sebesar 84,5% kualitas laporan keuangan, sementara 15,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di uji dalam penelitian ini.

4.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji hipotesis secara simultan (Uji Statistik F) dilakukan untuk menguji apakah variabel Sistem Pengendalian Internal (X1), Pemanfaatan Teknologi dan Informasi (X2), dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3) secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Tabel 4.6 Hasil Uji Hipotesis Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	2096,595	3	698,865	126,028	,000b
	Residual	365,990	66	5,545		
	Total	2462,586	69			

Sumber : Data primer yang telah diolah oleh peneliti (2024)

Hasil uji hipotesis pada tabel diatas menunjukkan dengan nilai signifikansi yang diperoleh ialah sebesar $0.000 < 0.05$, yang ini berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterim hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen secara simultan atau menyeluruh berpengaruh signifikan terhadap antara variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

4.4.3 Uji Parsial (Uji t)

Uji hipotesis secara parsial uji T adalah pengujian statistik dalam analisis regresi yang bertujuan untuk menilai pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Hipotesis Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std.Error	Beta		
1	(Constant)	7,984	2,671		2,989	,004
	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X1)	,515	,068	,682	7,577	,000
	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	,217	,058	,320	3,770	,000
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3)	-,016	,044	-,034	-,356	,723
b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						

Sumber : Data primer yang telah diolah oleh peneliti (2024)

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) untuk variabel sistem pengendalian internal pemerintah, diperoleh koefisien parameter sebesar 0,515 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000. Karena nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0.05, maka hipotesis nol (H_0) ditolak, yang berarti bahwa

variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X1) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

2. Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) untuk variabel pemanfaatan teknologi dan informasi, diperoleh koefisien parameter sebesar 0,217 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000. Karena nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0.05, maka hipotesis nol (H_0) ditolak, yang berarti bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).
3. Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) untuk variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan, diperoleh koefisien parameter sebesar -0,016 nilai signifikansi sebesar 0,723. Karena nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol (H_0) diterima yang berarti bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan pada Tabel 4.6 diperoleh nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$, Karena nilai signifikansi lebih kecil dari α (0,05), maka H_0 ditolak, hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen secara simultan atau menyeluruh berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan. Artinya semakin meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3) maka akan semakin baik pula laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini didukung oleh hasil uji koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.851 hal ini berarti bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (X1), Pemanfaatan Teknologi dan Informasi (X2), dan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3) memiliki pengaruh sebesar 85,1% kualitas laporan keuangan, sementara 14,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di uji dalam penelitian ini.

4.5.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Tangerang Selatan Tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 4.7 diperoleh tingkat signifikansi sebesar $0,000 > 0,05$. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari α (0,05), maka H_0 ditolak, hal ini mengindikasikan bahwa secara parsial Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. Artinya jika sistem pengendalian internal semakin baik maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan oleh SKPD Kota Tangerang Selatan akan semakin baik pula. Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah ini didukung oleh hasil pengujian statistik deskriptif mengenai tanggapan responden terkait dengan variabel sistem pengendalian internal pemerintah memperoleh skor rata-rata dengan kategori sangat baik yaitu sebesar 84,93% dengan presentase tertinggi ada pada indikator pemantauan. Hal ini diartikan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah pada bagian keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tangerang Selatan sistem pengendalian internal pemerintahan dilaksanakan dengan baik dan dilakukan pemantauan yang sangat baik dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan temuan Hendarin & Rahayu, (2022) Rahayu & Dewi Kanita, (2023), Oki et al., 2019, Yulia Damayanti Amanda et al., (2024) yang menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.5.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Tangerang Selatan Tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.7 diperoleh tingkat signifikansi sebesar $0,000 > 0,05$. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari α (0,05), maka H_0 ditolak, hal ini mengindikasikan bahwa secara parsial Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. Artinya bila pemanfaatan teknologi dilaksanakan semakin baik maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan oleh SKPD Kota Tangerang Selatan akan semakin baik pula. Pengaruh Pemanfaatan teknologi informasi ini didukung dengan hasil pengujian statistik

deskriptif mengenai tanggapan responden terkait dengan variabel pemanfaatan teknologi informasi diperoleh dengan kategori sangat baik sebesar 84,30% dengan tertinggi ada pada indikator proses akuntansi secara komputersisasi yaitu sebesar 87,57%, ini diartikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi pada bagian keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tangerang Selatan telah memanfaatkan teknologi informasi dengan baik serta dalam penyusunan laporan keuangan seluruh proses pencatatan telah dilakukan secara terkomputerisasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Admaja & Wahyundaru (2020), Wulan Anisa D et al (2020), Ayem et al (2023), dan Nurdin et al (2024) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

4.5.4 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Tangerang Selatan Tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.7 diperoleh tingkat signifikansi sebesar $0,723 > 0,05$. Karena nilai signifikansi lebih besar dari α (0,05), maka H_0 diterima, hal ini mengindikasikan bahwa secara parsial variabel standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan. Pengaruh standar akuntansi pemerintahan ini didukung dengan temuan pada uji analisis deskriptif dimana jawaban responden terhadap standar akuntansi pemerintahan menunjukkan masih terdapat responden menjawab “Tidak Setuju” pada indikator akuntansi persediaan. Hal ini menunjukkan masih terdapat SKPD yang belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Jatmiko et.al (2020), Apriansyah et.al (2020) dan Mahartini et.al, (2021).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan hasil dalam penelitian ini, maka beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya yaitu:

1. Berdasarkan hasil perhitungan deskriptif dari jawaban responden menunjukkan bahwa masing masing variabel penelitian ini yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (S3) Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) memiliki perolehan skor total presentase dengan rentang 84% – 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sistem pengendalian internal pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan berada pada kriteria sangat baik.
2. Pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Pengujian hipotesis secara parsial penunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal pemerintah, berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Pengujian hipotesis secara parsial penunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi, berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,
5. Pengujian hipotesis secara parsial penunjukkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan, tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,

5.2 Saran

5.2.1 Aspek Teoritis

Melalui hasil penelitian ini, penulis ingin memberikan saran bagi penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Bagi pihak akademisi, penelitian ini di harapkan dapat menjadi tambahan wawasan mengenai penelitian khususnya pada bidang *accounting*.
2. Bagi pihak peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel lainnya pada penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

5.2.2 Aspek Praktis

Melalui hasil penelitian ini, penulis ingin memberikan saran bagi: Penerapan standar akuntansi pemerintahan di SKPD Kota Tangerang Selatan sebaiknya lebih diperhatikan lagi mengingat pada tanggapan kuesioner dalam indikator penerapan standar akuntansi pemerintahan masi terdapat jawaban tidak setuju terhadap PSAP dengan cara seperti memberikan sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan yang intensif bagi pegawai yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan.

Referensi:

- Admaja Dananjaya Dipta, & Wahyundaru Sri Dewi. (2020). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Terciptanya Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang*.
- Apriansyah, Harry., Rahayu, Sri., Ernawati, Misni., (2020) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo, Jambi. *Jambi Accounting Review (JAR)*, 1(1), <https://online-journal.unja.ac.id/JAR/>
- Ayem, S., Amahala, R., Akuntansi, P., Ekonomi, F., Sarjanawiyata, U., & Yogyakarta, T. (2023). Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 12(01).
- Fazlurahman Faesal, Afiah Nunuy Nur, & Yudianto Ivan. (2020). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 190–196.
- Hendarin, A. P., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemahaman Akuntansi Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal Ekombis Review*, 1–3.
- Jatmiko, B., Irawan, D., Machmuddah, Z., & Laras, T. (2020). Factors Affecting Regional Government Financial Statements: Evidence From Indonesia. *Academic Journal Of Interdisciplinary Studies*, 9(2), 89–100. <https://doi.org/10.36941/Ajis-2020-0026>
- Lantu, F. T., Pangkey, R. I. J., & Sumampouw, O. (2023). Kabupaten Minahasa Utara. *Jaim: Jurnal Akuntansi Manado*, 4(1).
- Oki, I., Brata, D., Arnan, S. G., & Suharsono, L. (2019). The Effect Of Use Of Regional Financial Accounting Systems (Sakd) And Government Internal Control System (Spip) On The Quality Of Regional Government Financial Statements (Survey On West Bandung District Government). In *International Journal Of Innovation, Creativity And Change*. www.ijicc.net (Vol. 6, Issue 7).
- Pp Nomor 60 Tahun 2008. (N.D.). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Pp Nomor 71 Tahun 2010. (2023). *Berita Daerah Kota Tangerang Selatan*.
- Rahayu, S., & Dewi Kanita, A. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Provinsi Dki Jakarta Tahun 2022). *Jurnal Ekombis Review*, 11(1), 423–432.
- Sumaryati, A., Praptika Novitasari, E., & Machmuddah, Z. (2020). Accounting Information System, Internal Control System, Human Resource Competency And Quality Of Local Government Financial Statements In Indonesia. *Journal Of Asian Finance*, 7(10), 795–802.

Titikkata.Com. (2024, May 8). *Pemkot Tangsel Raih Wtp Ke-12, Ini Tanggapan Ketua Dprd Tangsel*. Titikkata.Com. <https://Titikkata.Com/Pemkot-Tangsel-Raih-Wtp-Ke-12-Ini-Tanggapan-Ketua-Dprd-Tangsel>

Yulia Damayanti Amanda, Iswanaji Chaidir, & Arifah Siti. (2024). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi, Kompetensi Sdm, Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Opd Kabupaten Kebumen Chaidir Iswanaji Universitas Tidar. *Journal Of Creative Student Research (Jcsr)*, 2(3), 211–224. <https://doi.org/10.55606/Jcsrpolitama.V2i3.3887>

